

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Pentingnya pengungkapan laporan tahunan oleh manajemen kepada pemegang saham didasarkan kepada teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (*agent*) yang mengatur manajemen sebuah perusahaan dan prinsipal (*principal*) atau pemilik perusahaan. Teori keagenan menjelaskan berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer dengan pemegang saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, kreditur dan manajer yang disebabkan adanya hubungan keagenan.

Sifat dasar manusia untuk mementingkan diri sendiri dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Kedua pihak memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan dari masing-masing pihak melalui deviden yang diterima principal dan kompensasi yang diterima agen. Perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan yang terjadi antara pemilik (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen) dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan masalah keagenan yang disebut dengan konflik agensi (Jasen dan Meckling, 1976).

konflik agensi terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jasen dan Meckling, 1976). Hal ini

menyebabkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang daripada pemegang saham dan *stakeholder*. Asimetri informasi ini sangat merugikan bagi pihak *stakeholder*, oleh karena itu para *stakeholder* memerlukan suatu alat kontrol untuk mengurangi resiko terjadinya asimetri informasi. Alat kontrol yang dapat digunakan oleh *stakeholder* adalah informasi yang berupa pengungkapan wajib pada laporan tahunan perusahaan. Adanya pengungkapan wajib maka akan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai perusahaan bagi *stakeholder*.

2.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2014:33). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu dapat dinilai dengan modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Tinggi rendahnya laba merupakan faktor penting perusahaan. Besar kecilnya laba perusahaan dapat diketahui melalui analisa laporan keuangan perusahaan dengan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (I Made Sudana, 2015:25). Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat keuntungan yang diperoleh manajemen dapat mempengaruhi kompensasi yang akan diterima manajemen.

Menurut Kasmir (2014:197), tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periodetertentu;
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu kewaktu;
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modalsendiri;
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modalsendiri.

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara sebagai berikut (I Made Sudana, 2015:25):

- 1) *Return On Assets* (ROA)

Return On Asstes (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang samabisa dihasilkan laba yang besar, dan sebaliknya.

ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Sumber: I Made Sudana (2015)

- 2) *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

3) *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Profit Margin Ratio dibedakan menjadi:

a. *Net Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

b. *Operating Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam menghasilkan laba.

c. *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang dicapai bagian produksi.

Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan keuntungan perusahaan merupakan informasi positif yang harus diberitahukan kepada pemegang saham perusahaan, sehingga manajemen mendapatkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya.

2.3 Leverage

Leverage merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor (Fahmi, 2015). Leverage dapat diukur dengan seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian.

Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang (Sutrisno, 2013:224). Penggunaan jumlah utang perusahaan tergantung pada keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan ketersediaan aktiva yang bisa digunakan sebagai jaminan atas utang tersebut.

Menurut kasmir (2014:153) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).

- 2) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Rasio leverage dapat diukur dengan berbagai cara sebagai berikut (Sutrisno, 2013:224):

- 1) Rasio Hutang (*Debt Ratio* atau *Total Debt to Total Asset Ratio*)

Rasio ini mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang.

Hutang ini termasuk semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. *Debt Ratio* yang rendah dapat menyebabkan tingkat keamanan dana perusahaan menjadi semakin baik dan kreditor lebih menyukai ini. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Sumber: Sutrisno (2013)

- 2) Rasio Hutang dengan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit

disbanding dengan hutangnya. Sebaiknya besar hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya debt to equity maksimal 100%.

3) Rasio Laba sebelum Bunga dan Pajak (*Time Interest Earned Ratio* atau *Coverage Ratio*)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya atau mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa laba yang tersedia untuk membayar biaya bunga semakin besar.

4) *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa.

Leverage menunjukkan seberapa jauh aset perusahaan didanai dengan menggunakan kewajiban (Popova *et al.*, 2013). Penggunaan utang yang sangat besar dalam perusahaan akan membuat perusahaan menyediakan informasi yang lebih banyak untuk memenuhi tuntutan investor dan kreditor, karena kreditor akan selalu mengawasi dana yang dipinjamkannya kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan informasi secara lebih rinci sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya keagenan karena manajemen bisa

memberikan informasi untuk menyakinkan kreditor jangka panjang bahwa perusahaan mampu melunasi kewajibannya.

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal (Agnes Sawir, 2012:17). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan (Jogiyanto, 2013:282). Ukuran perusahaan memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik pengungkapan perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan struktur kepemilikan yang dimilikinya. Pengawasan publik yang tinggi memotivasi perusahaan-perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi yang berkualitas tinggi (Saad dan Jarboui, 2015). Perusahaan-perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memberikan pengungkapan yang transparan daripada perusahaan kecil. Berdasarkan Peraturan UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan klasifikasi ukuran perusahaan dibagi kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (size) sebuah perusahaan, antara lain (Jogiyanto, 2013:282):

- 1) Ukuran total aset

Asset yang dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya terdiri atas asset lancar dan asset tetap. Perusahaan yang memiliki asset tetap yang besar menunjukkan bahwa kegiatan operasi perusahaan akan dapat ditopang dengan baik yang tercermin melalui revenue yang diperoleh perusahaan.

- 2) Hasil penjualan bersih

Analisis penjualan selama ini memberikan perhatian kepada pertumbuhan permintaan produk perusahaan sebagai hal yang penting terhadap kesuksesan investasi. Namun, pertumbuhan dalam kemampuan

menghasilkan laba, bukan penjualan per unit merupakan tujuan yang ingin dicapai.

3) Kapitalisasi pasar (*market capitalized*)

Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan semakin dikenal masyarakat (investor).

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total asset yang dimiliki, atau total penjualan yang diperolehnya.

2.5 Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan

Pengungkapan merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pengungkapan adalah penyajian informasi atau penjelasan yang lebih mengenai perusahaan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2014:579).

Menurut Balkoui dan Riahi (2011), tujuan pengungkapan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut diluar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
- 2) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut.
- 3) Untuk memberikan informasi yang membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.

- 4) Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan pengguna laporan keuangan melakukan perbandingan dalam satu tahun dan diantara beberapa tahun.
- 5) Untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk atau arus kas keluar dimasa depan.
- 6) Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Pengungkapan informasi tercermin dalam laporan tahunan perusahaan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/PJOK.04/2016 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (OJK, 2016). Laporan tahunan terdiri dari laporan tahunan dengan pengungkapan wajib dan laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/PJOK.04/2016 Pasal 4 menyebutkan butir-butir laporan tahunan wajib meliputi:

- 1) Ikhtisar data keuangan penting, meliputi 16 item;
- 2) Informasi saham, meliputi 8 item;
- 3) Laporan Direksi, meliputi 3 item;
- 4) Laporan Dewan Komisaris, meliputi 5 item;
- 5) Profil Emiten atau perusahaan publik, meliputi 26 item;
- 6) Analisis dan pembahasan manajemen, meliputi 11 item;
- 7) Tata kelola Emiten atau perusahaan publik, meliputi 36 item;

- 8) Tanggung jawab social dan lingkungan emiten atau perusahaan publik, meliputi 18 item;
- 9) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
- 10) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggungjawab atas laporan tahunan.

Berikut ini adalah rincian item indeks pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a) Iktisar data keuangan penting, meliputi:
 - 1) Pendapatan;
 - 2) Laba bruto;
 - 3) Laba (rugi);
 - 4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - 5) Total laba komprehensif;
 - 6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - 7) Laba (rugi) per saham;
 - 8) Jumlah asset;
 - 9) Jumlah liabilitas;
 - 10) Jumlah ekuitas;
 - 11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah asset;
 - 12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - 13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
 - 14) Rasio lancer;

- 15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - 16) Rasio liabilitas terhadap jumlah asset;
 - 17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya;
- b) Informasi saham, meliputi:
- 1) Jumlah saham yang beredar;
 - 2) Kapitalisasi pasar;
 - 3) Harga saham tertinggi, terendah dan penutupan;
 - 4) Volume perdagangan;
 - 5) Dalam hal terjadi aksi korporasi, paling sedikit memuat:
 - a. Tanggal pelaksanaan korporasi;
 - b. Rasio pemecahan saham;
 - c. Jumlah saham yang beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;
 - d. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.
- c) Laporan Dewan Komisaris, meliputi:
- 1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelola perusahaan;
 - 2) Pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan
 - 3) Perdagangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi;
 - 4) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi
- d) Laporan Direksi, meliputi:
- 1) Kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
 - 2) Gambaran tentang prospek usaha;
 - 3) Penerapan tata kelola perusahaan; dan

- e) Profil Perusahaan atau Emiten, meliputi:
- 1) Nama, alamat, nomor telepon, nomor faxmile, alamat surat elektronik (E-mail) dan laman (website) perusahaan dan /atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan;
 - 2) Sejarah singkat perusahaan;
 - 3) Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir serta jenis produk atau jasa yang dihasilkan;
 - 4) Struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat dibawah Direksi;
 - 5) Visi dan Misi perusahaan;
 - 6) Profil Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Nama dan foto terbaru;
 - b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;
 - c. Riwayat pendidikan;
 - d. Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
 - 7) Profil Direksi, meliputi:
 - a. Nama, foto terbaru dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
 - b. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;

- c. Riwayat pendidikan;
 - d. Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
- 8) Dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan /atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan /atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya;
- 9) Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan;
- 10) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:
- a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5%
- 11) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram;

- 12) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat;
 - 13) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);
 - 14) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);
 - 15) nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada);
 - 16) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, *fee*, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan
 - 17) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada).
- f) Analisis dan Pembahasan Manajemen, mencakup:
- 1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik
 - 2) analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan.

- 3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 4) tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 5) struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut;
- 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 7) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;
- 8) prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;
- 9) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 10) target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;

- 11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;
 - 12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - 13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
 - 14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada), yang antara lain memuat:
 - 15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan
 - 16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).
- g) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), meliputi:
- 1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
 - a. uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
 - b. pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;

- 2) Direksi, mencakup antara lain:
- a. ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - b. pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan;
 - c. pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;
 - d. keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan
 - e. pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);
- 3) Komite Audit, mencakup antarlain:
- a. Nama dan foto terbaru;
 - b. riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. periode jabatan anggota Komite Audit;
 - e. pengungkapan independensi Komite Audit;
 - f. pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;

- g. uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit;
- 4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antarlain:
- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
- a. nama dan foto terbaru;
 - b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c. riwayat pendidikan;
 - d. periode jabatan sekretaris perusahaan;
 - e. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;
- 6) uraian mengenai unit audit internal meliputi:
- a. nama dan foto terbaru;
 - b. riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - d. struktur dan kedudukan unit audit internal;
 - e. tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) unit audit internal; dan
 - f. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;
- 7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (*internal control*) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:

- a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - b. reviu atas efektivitas sistem pengendalian internal;
- 8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
- a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;
 - b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
 - c. reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;
- 9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
- a. pokok perkara/gugatan;
 - b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan
 - c. pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
- 10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);
- 11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi:
- a. pokok-pokok kode etik;
 - b. pokok-pokok budaya perusahaan (*corporate culture*);
 - c. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - d. pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan;

12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* (jika ada); dan

13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:

- a. cara penyampaian laporan pelanggaran;
- b. perlindungan bagi pelapor;
- c. penanganan pengaduan;
- d. pihak yang mengelola pengaduan; dan
- e. hasil dari penanganan pengaduan.

h) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:

- a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;
- b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;
- c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan,

perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan

d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).

i) Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit

Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan.

j) Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung jawab atas laporan tahunan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.6.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun, Nama	Variabel	Hasil
1.	<i>Firm Specific determinants of the Comprehensiveness of Mandatory Disclosure in the Corporate Annual Reports Firms Listed on the Stock Exchange of Hongkong</i> (1995) Walace dan Naser	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran Perusahaan 2) Ukuran Audit 3) Likuiditas 4) Leverage <p>Variabel dependen: Tingkat Pengungkapan wajib dalam Laporan Tahunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 2) Ukuran Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 3) Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib 4) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib
2.	<i>Regulatory Change and the Quality of Compliance to Mandatory Disclosure Requirements: Evidence from Bangladesh</i> (2005) Tanweer Hasandan A. K. M. Waresul Karim	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi akuntan 2) Reputasi Auditor 3) Leverage 4) Ukuran Perusahaan 5) Afiliasi Multinational 6) Profitabilitas <p>Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi akuntan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 2) Reputasi Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 3) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 4) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

			tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 5) Afiliasi multilasional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 6) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
3.	<i>Disclosure Level and Compliance with IFRS: An empirical investigation of Kuwaiti Companies</i> (2010) Al-Mutawaa dan Hewaidy	Variabel Independen: 1) Ukuran perusahaan 2) Profitabilitas 3) Leverage 4) Jenis Auditor Variabel Dependen: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan IFRS	1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS 2) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS 3) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS 4) Jenis Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS
4.	<i>The Association between The Firm Characteristics and Corporate Mandatory Disclosure the case of Greece</i> (2011) Despina Galani, Anastasios Alexandridis., dan Antonios Stavropoulos	Variabel Independen: 1) Ukuran Perusahaan 2) Umur Perusahaan 3) Profitabilitas 4) Likuiditas 5) Komposisi Dewan Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Wajib	1) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 2) Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 3) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat

			<p>pengungkapan wajib</p> <p>4) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib</p> <p>5) Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib</p> <p>6) Komposisi dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib</p>
5.	<p><i>Factors Influencing the extent of Corporate Compliance with IFRS: Evidence from Companies Listed in Bahrain Stock Exchange (2012)</i></p> <p>Omar I. H. Juhmani</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>1) Ukuran Perusahaan</p> <p>2) Profitabilitas</p> <p>3) Leverage</p> <p>4) Jenis Auditor</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p>	<p>1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>2) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>3) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS</p> <p>4) Jenis Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS</p>
6.	<p>Investigasi dalam konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan kaitannya dengan mekanisme corporate governance (2012)</p>	<p>Variable Independen:</p> <p>1) Kepemilikan Manajerial</p> <p>2) Kepemilikan Institusional</p> <p>3) Jumlah Rapat Dewan Komisaris</p> <p>4) Jumlah Rapat Komite Audit</p>	<p>1) Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>2) Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan</p>

			signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan
--	--	--	--

Wulan Dwi Utami, Djoko Suhardjanto dan Sri Hartoko	<p>5) Proporsi Komisaris Independen</p> <p>Variabel Kontrol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Leverage 2) Profitabilitas 3) Tipe Auditor <p>Variabel Dependen: Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3) wajib IFRS Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 4) IFRS Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 5) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 6) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 7) Tipe Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS
--	--	--

7.	<p><i>The Impact of adopting AIFRS Australia: The Exten and Quality of Disclosure, and Their Relationship to Corporate Characteristics</i> (2013) Philip D. Palmer</p>	<p>Variabel Independen: 1) Ukuran Perusahaan 2) Jenis Industri 3) Profitabilitas 4) Leverage 5) Ukuran Auditor</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Pengungkapan Wajib IFRS</p>	<p>1) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>2) Jenis Industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>3) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>4) Leverage berpengaruh</p>
			<p>positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p> <p>5) Jenis Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS</p>

8.	<p><i>The extent of compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) by Listed</i> (2014) Volkan Demir dan Oguzhan Bahadir</p>	<p>Variabel Independen: 1) Ukuran Perusahaan 2) Profitabilitas 3) Leverage 4) Ukuran Auditor</p> <p>Variabel dependen: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan IFRS</p>	<p>1) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS 2) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS 3) Leverage berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS 4) Ukuran Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS</p>
9.	<p><i>The Relationship between Firm Characteristics and Mandatory Disclosure Level: When Egyptian Accounting Standards were first adopted</i> (2014) Narmeen F. Shehata, Tariq Ismail dan Khaled Dahawy</p>	<p>Variabel Independen: 1) Ukuran Perusahaan 2) Leverage 3) Likuiditas 4) <i>Asset in Place</i> 5) Ukuran Auditor</p> <p>Variabel dependen: Tingkat Pengungkapan Wajib</p>	<p>1) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 2) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 3) Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib 4) <i>Asset in Place</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib</p>
			<p>5) Jenis auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib</p>

10.	<p><i>Effect of Corporate Attributes on International Reporting Standarts Disclosure Level: Evidance from Kenya Listed Firms</i> (2015) Kipchoge Kipro Andrew</p>	<p>Variable Independen: 1) Profitabilitas 2) Leverage 3) Likuiditas 4) Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat pengungkapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS)</p>	<p>1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) 2) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) 3) Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) 4) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS)</p>
11.	<p>Pengaruh Ukuran, Umur Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas Pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan (2016) Luh Gade Putri Maharani dan I. G. A. N. Budiasih</p>	<p>Variable Independen: 1) Ukuran Perusahaan 2) Umur Perusahaan 3) Struktur Kepemilikan 4) profitabilitas</p> <p>Variabel Dependen: Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan</p>	<p>1) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Wajib Laporan Tahunan 2) Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Wajib Laporan Tahunan 3) Struktur Kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Wajib Laporan Tahunan</p>
			<p>4) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Wajib Laporan Tahunan</p>

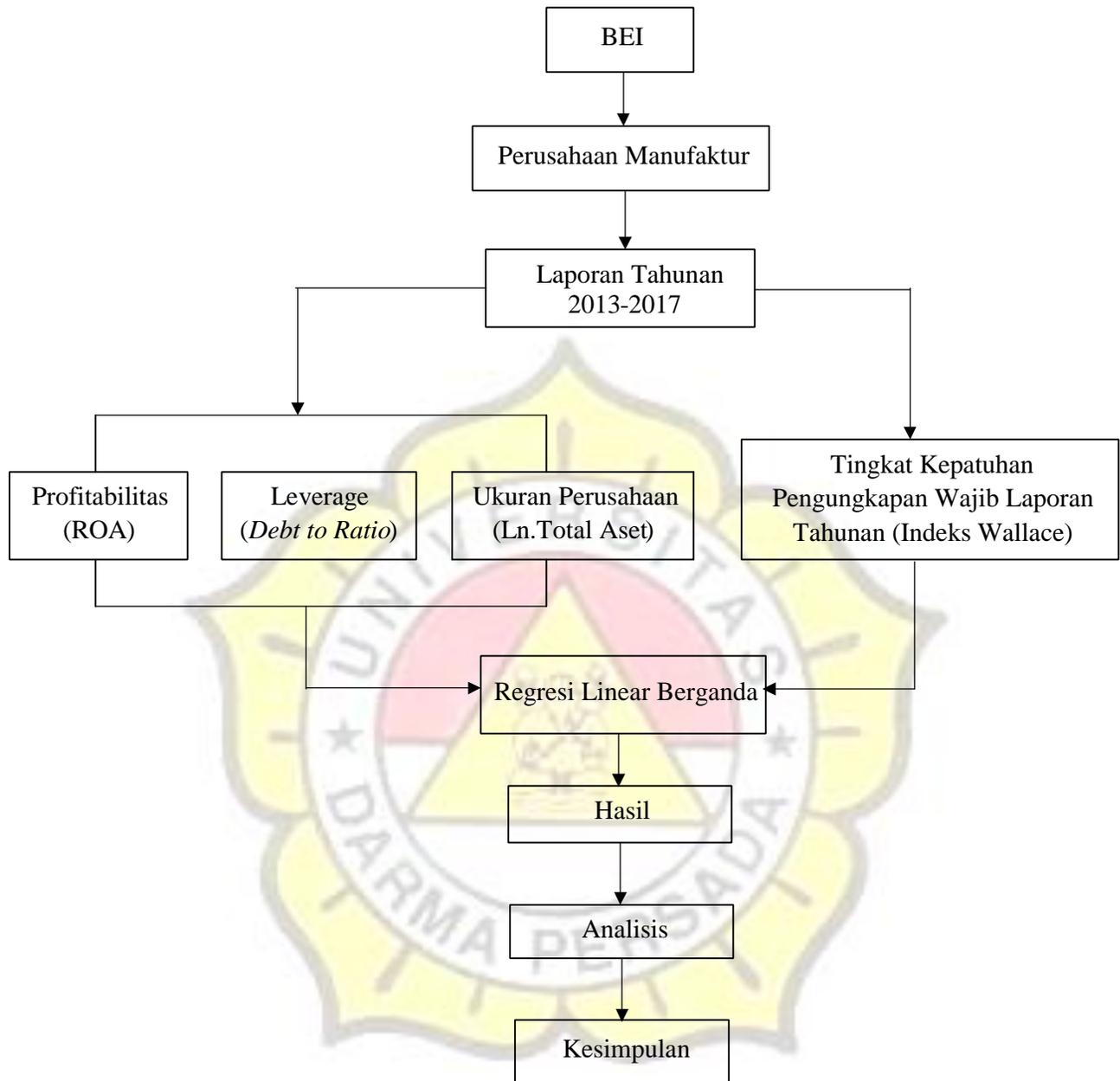
12.	<i>Firm Characteristics and Compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) by Listed Financial Service Companies in Nigeria (2017)</i> Loravel Nyenger Tsegba, Joy Semberfan, dan Gabriel M. Tyokoso	Variabel Independen : 1) Profitabilitas 2) Ukuran Perusahaan 3) Ukuran Auditor 4) Leverage Variabel Dependen : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib IFRS	1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 3) Jenis Auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS 4) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
-----	---	--	---

Sumber: data diolah oleh penulis (2018)

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjuk pada gambar berikut:

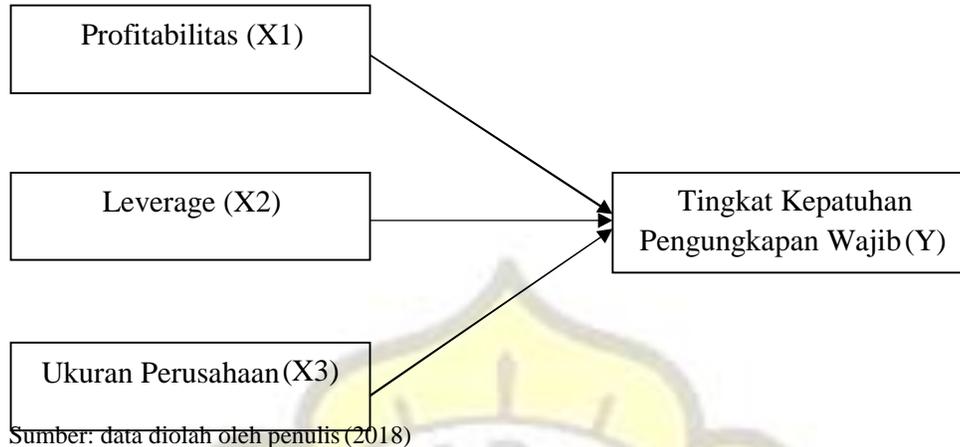
Gambar 2.7.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: data diolah oleh penulis (2018)

Gambar 2.7.2

Hubungan Variabel



Keterangan:

X1 : Profitabilitas ($ROA = EBIT/Total\ Aset$)

X2 : Leverage ($Debt\ to\ Ratio = Total\ Hutang/Total\ Aset$)

X3 : Ukuran Perusahaan (Log dari Total Aset)

Y : Pengungkapan Wajib (*Index Wallace*)

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Wajib Laporan

Tahunan

Profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajemen untuk memberikan informasi yang lebih rinci karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholder* bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga memudahkan perusahaan mendapatkan modal dari investor (Inchausti, 1997). Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gade Putri Maharani dan I. G. A. N. Budiasih (2016) mengenai diantaranya profitabilitas terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan

tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib dalam laporan tahunan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Utami dkk., (2012) yang menunjukan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib laporan tahunan.

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib.

2.8.2 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Wajib Laporan

Tahunan

Leverage menunjukkan seberapa jauh asset perusahaan didanai dengan menggunakan kewajiban (Popova *et al.*, 2013). Penggunaan utang yang sangat besar dalam perusahaan akan membuat perusahaan menyediakan informasi yang lebih banyak untuk memenuhi tuntutan investor dan kreditor, karena kreditor akan selalu mengawasi dana yang dipinjamkannya kepada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Karim dan Ahmed (2005) menunjukkan bahwa tingkat leverage berpengaruh positif terhadap seberapa luas perusahaan harus mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chavent *et al.* (2006) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan dengan kepatuhan pengungkapan perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₂: Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib.

2.8.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Wajib

Laporan Tahunan

Ukuran perusahaan memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik pengungkapan perusahaan. Pengawasan publik yang tinggi mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi yang berkualitas (Saad dan Jarboui, 2015). Perusahaan-perusahaan besar memiliki kecendrungan untuk memberikan pengungkapan yang transparan daripada perusahaan kecil karena memiliki banyak uang dan sumber daya. Selain itu, perusahaan besar cenderung tunduk pada pengawasan oleh masyarakat daripada perusahaan kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Shehata *et al.* (2014) tentang hubungan karakteristik perusahaan dan tingkat pengungkapan wajib pada perusahaan di Mesir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tsegba *et al* (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada perusahaan jasa keuangan di Nigeria.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib.

